

DINAMIKA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001

Dyah Ratih Sulistyastuti

Center for Entrepreneurship and Policy Analysis (CEPA) Yogyakarta

Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) are the most relevant topic to be discussed in Indonesia because of their significant contribution to the economic development in this country. The important role of SMEs in Indonesia is not only limited as job provider for the vast majority of the people, but also very vital in combating poverty, reducing unemployment, distributing income, and increasing non-oil export. The role of SMEs becomes even higher along with the emerging of autonomy era and globalization. While SMEs were seen only as job provider in the past, nowadays, SMEs are hoped can give more significant contribution in enhancing non-oil export and provide input for the large-scale industries as subcontractor.

This study is aimed to understand the dynamics of SMEs in Indonesia between 1999-2001. The analysis in this study will be focused to identify the concentration patterns and the growth of SMEs. The data used in this study are secondary data which were obtained from the Bureau of Statistics. The instruments of analysis employed in this study consist of concentration index and geographic information system. This study found that the growth of SMEs in Indonesia has not been distributed equally across the country. SMEs have been found in a very high concentration in several provinces; meanwhile they are less concentrated in the majority of the provinces.

Keywords: *SMEs, analysis of regional concentration.*

PENDAHULUAN

Di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Di negara-negara maju dan negara-negara industri baru (*New Industrial Countries* atau NICs), UKM memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor dan sebagai subkontraktor yang menyediakan berbagai input bagi usaha yang berskala besar sekaligus sumber inovasi. Agak berbeda dengan di negara-negara maju, pentingnya UKM di negara-negara sedang berkembang seringkali lebih dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi maupun sosial yaitu: mengurangi pengangguran, pemberantasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Di samping itu,

keberadaan UKM di negara berkembang seperti di Indonesia adalah untuk mengeliminasi ketimpangan yang diakibatkan oleh proses pembangunan yang tidak merata, terutama karena terjadinya bias pembangunan perkotaan yang menyebabkan daerah pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding dengan daerah perkotaan. Meskipun peran UKM di negara-negara maju berbeda dengan di negara-negara yang sedang berkembang, akan tetapi berbagai studi empiris yang telah dilakukan, baik di negara maju maupun berkembang, memberikan pengakuan akan pentingnya keberadaan sekaligus perkembangan UKM.

UKM memiliki peran komplementer dengan perusahaan-perusahaan besar dalam penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi (Giaoutzi et.al, 1988,

Amstrong et.al, 2000, Tambunan, 2000, Sudarto, 2001). Urata (2000) yang telah mengamati perkembangan UKM di Indonesia menegaskan bahwa UKM memainkan beberapa peran penting di Indonesia. Beberapa perannya yaitu: (1). UKM pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, (2). Penyedia kesempatan kerja, (3). Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat, (4). Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitasnya serta keterkaitn dinamis antar kegiatan perusahaan, (5). Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas. Sementara itu, Tambunan (2001) menyebutkan bahwa UKM juga mampu mereduksi ketimpangan pendapatan (*reducing income inequality*) terutama di negara-negara berkembang.

Di negara-negara industri baru seperti Korea dan Jepang kontribusi UKM lebih terkait dengan peningkatan ekspor, subkontraktor serta agen inovasi. Di Korea, perkembangan UKM yang pesat tidak sekedar memberi kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kontribusi UKM di negara tersebut juga memberikan nilai tambah yang cukup besar. Tenaga kerja dan nilai tambah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 60% dan 40% per tahun dalam struktur industrinya. Perannya yang sangat signifikan dalam penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah tersebut telah membuktikan bahwa UKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan (Nugent dan Yhee, 2002). Selama periode 1990-1995, Nugent dan Yhee juga menyebutkan bahwa UKM menyumbangkan rata-rata 40% dari total ekspor. Kemudian UKM yang melakukan subkontrak dengan usaha berskala besar rata-rata 70% pada periode yang sama dan 50%nya memperoleh transfer teknologi. Demikian pula di Jepang, UKM yang melakukan subkontrak dengan usaha besar rata-rata 65% selama 1981-1987 (Kimura, 2002).

Keberadaan UKM di Indonesia lebih dikaitkan dengan perannya secara klasik yaitu mengatasi pengangguran dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia selama periode 1998-2001 jumlah unit usaha UKM mengalami pertumbuhan rata-rata 11% pertahun (Deperindag, 2002). Pertumbuhan UKM memberikan dampak yang sangat positif terhadap penciptaan kesempatan kerja.

Data pada Tabel 1 menunjukkan perbandingan jumlah unit usaha dan tenaga kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Besar (UB) dalam struktur industri di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2001. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa UKM mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan unit usaha UKM selama 1998-2001 lebih tinggi dibanding UB, di mana pertumbuhan UKM berkisar 11% pertahun sedangkan pertumbuhan UB hanya 6%.

Data Tabel 1 menunjukkan pula bahwa ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, struktur industri di Indonesia masih didominasi oleh UKM. Hal ini dapat dilihat dari proporsi unit usaha UKM dibanding perusahaan besar dari tahun ke tahun secara konsisten di atas 99%. Kedua, UKM sangat penting sebagai penyedia lapangan kerja di Indonesia. Pertumbuhan UKM juga menjadi sangat berarti karena mendorong pertumbuhan Dagang Kecil Menengah (DKM). Pada periode yang sama DKM mengalami pertumbuhan rata-rata 5% per tahun (Deperindag, 2002). Sementara itu, sebagaimana dikutip Udjijanto (2003) dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2000 *share* UKM dalam perolehan PDB Indonesia, sebesar 63,5%. Hal lain yang menarik perhatian bahwa dalam suasana minimnya lapangan kerja, UKM Indonesia menyerap sekitar 73,6 juta pekerja. Di samping itu, muatan lokal produk UKM cukup tinggi, sehingga keuntungan nasional dari produk-produk UKM juga tinggi.

Tabel 1. Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan UB di Indonesia selama tahun 1998-2001 (dalam ribu)

	1998	1999	2000	2001
Unit Usaha*				
UKM	2.114,44 (99,97%)	2.536,22 (99,97%)	2.724,67 (99,97%)	2.885,82 (99,97%)
UB	0,63 (0,03%)	0,67 (0,03%)	0,71 (0,03%)	0,76 (0,03%)
Tenaga Kerja**				
UKM	8.329,53 (97,4%)	10.135,52 (97,85%)	10.708,42 (97,85%)	11.363,76 (97,85%)
UB	220,97 (2,6%)	222,31 (2,15%)	234,88 (2,15%)	249,25 (2,15%)

Sumber: Deperindag, (2002)

* = Unit Usaha dalam ribu unit

** = Tenaga Kerja dalam ribu orang

Selain argumen-argumen di atas, pentingnya UKM di Indonesia terkait dengan posisinya yang strategis dalam berbagai aspek. Setidaknya ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UKM di Indonesia. Pertama, aspek permodalan. UKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit perusahaan besar. Kedua, aspek tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal/tinggi tertentu (Tambunan, 2000). Sebagian besar tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil didasarkan atas pengalaman (*learning by doing*) yang terkait dengan faktor historis (*path dependence*). Hal ini sering ditemui pada industri kerajinan, ukir, batik. Ketiga, aspek lokasi. Sebagian besar industri kecil berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar (Rietveld, 1987, Weijland, 1999). Keempat aspek ketahanan. Peranan industri kecil ini telah terbukti bahwa industri kecil memiliki ketahanan yang kuat (*strong survival*) ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi (Sandee, 2000). Data tahun 1998 menunjukkan bahwa struktur industri di Indonesia didominasi oleh UKM yaitu menguasai 99,8%, semen-

tara sisanya sebesar 0,2% merupakan pelaku usaha besar. Peran ini makin berarti dalam penyerapan tenaga kerja selama krisis. Dalam periode yang sama UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,6% dan sisanya 0,4% yang terserap oleh industri besar. Krisis ekonomi yang terjadi memberikan hikmah yaitu munculnya kesadaran dan pengakuan atas pentingnya peran UKM dalam pembangunan nasional di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan ekonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan ekonomi lokal sesuai potensinya menjadi sangat penting. Sudah selayaknya apabila pada era desentralisasi isu tersebut makin mendapat perhatian. Dengan beberapa keunggulannya, UKM memiliki posisi yang strategis bagi pengembangan ekonomi regional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah, penggalian potensi daerah menuju spesialisasi regional penting mendapat perhatian.

Sejalan dengan era desentralisasi dan pengembangan ekonomi regional maka peranan dan posisi UKM yang strategis tersebut tentu sangat relevan bagi keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, UKM di

daerah tentunya sangat diperlukan untuk menciptakan iklim berusaha/ bersaing di daerah. Era Otonomi Daerah memberikan implikasi yaitu daerah merencanakan sendiri pembangunan di daerahnya dengan dukungan sumberdaya lokal. Hal ini menjadikan posisi UKM sangat penting untuk mewujudkan pengembangan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat. Relevansi pengembangan UKM dalam pembangunan ekonomi tersebut makin relevan dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.

Meskipun peran UKM sangat vital bagi pembangunan ekonomi regional, namun dalam kenyataan kesenjangan pertumbuhan UKM di beberapa daerah (antara Jawa dan Luar Jawa) masih terjadi. Di beberapa daerah keberadaan UKM sangat dominan terutama di Pulau Jawa, sementara itu di daerah lain jumlah UKM masih sangat tertinggal. Kondisi kesenjangan yang digambarkan tersebut secara lebih jelas sebagaimana pada Tabel 2, yang memperlihatkan adanya konsentrasi UKM di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 7% dari seluruh luas wilayah Indonesia. Sekitar 80% keberadaan dan pertumbuhan UKM di wilayah Indonesia bagian barat. Selebihnya sekitar 20% UKM tersebar di wilayah Indonesia bagian timur.

Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mendominasi pola penyebaran UKM. Lebih dari 60% konsentrasi UKM di Pulau Jawa. Pulau Sumatera yang memiliki luas dan sumber daya alam melimpah hanya terdapat 10% hingga 14% dari total UKM di Indonesia. Begitu

juga Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang masing-masing hanya dibawah 10%. Konsentrasi UKM secara spasial tersebut tentu saja tidak menguntungkan dalam konstelasi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pemerataan. Kesenjangan UKM antar propinsi juga akan melemahkan proses industrialisasi, dimana Indonesia memiliki struktur industri yang masih didominasi oleh keberadaan UKM. Oleh sebab itu, pengembangan UKM sangat diperlukan bagi pembangunan regional terutama setelah otonomi daerah diberlakukan, mengingat keunggulan-keunggulan yang dimiliki UKM.

Memang pertumbuhan UKM terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Namun demikian, Tabel 2 memperlihatkan bahwa UKM mengalami pertumbuhan unit usaha dari tahun ke tahun. Pertumbuhan UKM baik dari unit usaha maupun tenaga kerja tentu memberikan arti yang sangat penting. Di Indonesia, dilihat dari jumlah unit usaha yang sangat besar di semua sektor ekonomi maka UKM sangat penting sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

Bukti lain mengenai dominannya peran UKM juga ditampilkan pada Tabel 3. Tabel 3 memperlihatkan bahwa UKM selalu mendominasi dalam penyedia kesempatan kerja dari berbagai sektor. Hal ini berdampak sangat positif bagi pembangunan di Indonesia dimana usaha besar memiliki keterbatasan dalam menyediakan kesempatan kerja. Kemampuan UKM menyerap tenaga kerja secara konsisen di atas 90% di berbagai sektor industri sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Distribusi Unit Usaha UKM di Indonesia, 1998-2001¹

PROPINSI	1998		1999		2000		2001	
		Proporsi		Proporsi		Proporsi		Proporsi
SUMATERA	4512467	0,173	4274659	0,160	4304381	0,156	4169481	0,153
01. Nanggroe Aceh Darusalam	566409	0,022	423314	0,016	367346	0,013	340425	0,013
02. Sumatera Utara	1145136	0,044	1099003	0,041	1123005	0,041	1212050	0,045
03. Sumatera Barat	660329	0,025	633437	0,024	675276	0,024	593343	0,022
04. Riau	378081	0,015	367482	0,014	371671	0,013	288883	0,011
05. Jambi	228978	0,009	256733	0,010	257127	0,009	223125	0,008
06. Sumatera Selatan	724776	0,028	735298	0,028	739304	0,027	751337	0,028
07. Bengkulu	137625	0,005	125128	0,005	132214	0,005	118701	0,004
08. Lampung	671133	0,026	634264	0,024	638334	0,023	641617	0,024
JAWA & BALI	17306406	0,664	18231803	0,682	18839443	0,681	18667285	0,686
09. DKI Jakarta	1475955	0,057	1354297	0,051	1416453	0,051	1422523	0,052
10. Jawa Barat	5114130	0,196	5178661	0,194	5330645	0,193	5299525	0,195
11. Jawa Tengah	4520048	0,173	5086584	0,190	5284228	0,191	5228412	0,192
12. DI Jogjakarta	556731	0,021	623776	0,023	661964	0,024	744396	0,027
13. Jawa Timur	5106646	0,196	5422836	0,203	5569464	0,201	5492120	0,202
14. Bali	532896	0,020	565649	0,021	576689	0,021	480309	0,018
NUSA TENGGARA	818598	0,031	849930	0,032	1110595	0,040	909127	0,033
15. NTB	514510	0,020	499810	0,019	696722	0,025	566637	0,021
16. NTT	304088	0,012	350120	0,013	413873	0,015	342490	0,013
KALIMANTAN	1356565	0,052	1496588	0,056	1507297	0,054	1462591	0,054
17. Kalimantan Barat	351070	0,013	403949	0,015	437630	0,016	411580	0,015
18. Kalimantan Tengah	253710	0,010	257779	0,010	242033	0,009	278056	0,010
19. Kalimantan Selatan	465590	0,018	516939	0,019	481850	0,017	468561	0,017
20. Kalimantan Timur	276195	0,011	317921	0,012	345784	0,012	304394	0,011
SULAWESI	1697103	0,065	1752840	0,066	1800091	0,065	1605868	0,059
21. Sulawesi Utara	431069	0,017	414561	0,016	414273	0,015	393023	0,014
22. Sulawesi Tengah	232242	0,009	251276	0,009	289603	0,010	294433	0,011
23. Sulawesi Selatan	852221	0,033	896028	0,034	904027	0,033	730051	0,027
24. Sulawesi Tenggara	181571	0,007	190975	0,007	192188	0,007	188361	0,007
MALUKU & PAPUA	329037	0,013	110038	0,004	102883	0,004	390304	0,014
25. Maluku	206332	0,008					186675	0,007
26. Papua	122705	0,005	110038	0,004	102883	0,004	203629	0,007
INDONESIA	26070721	1,00	26715858	1,00	27664690	1,00	27204656	1,00

Sumber: BPS, diolah

¹ Penentuan UKM oleh BPS didasarkan atas tenaga kerja

Tabel 3. Distribusi Tenaga Kerja UKM menurut Sektor, 1997 dan 2000

	1997			2000		
	UKM	UB	UKM+UB	UKM	UB	UKM+UB
31 (pertanian)	29.891.389 (99,8%)	40.443 (0,13%)	29.931.832 (100,0%)	33.036.240 (99,9%)	38.127 (0,1%)	33.074.367 (100,0%)
32 (pertambangan)	467942 (97,6%)	11.617 (2,4%)	479.559 (100,0%)	558.167 (97,8%)	12.531 (2,2%)	570.698 (100,0%)
33 (manufaktur)	10.067.165 (97,6%)	242.973 (2,4%)	10.310.138 (100,0%)	14.191.921 (98,3%)	242.169 (1,7%)	14.434.090 (100,0%)
34 (listrik,gas,air)	134.615 (94,6%)	7.716 (5,4%)	142.331 (100,0%)	174.728 (95,0%)	9.159 (5,0%)	183.887 (100,0%)
35 (bangunan)	1.012.215 (99,3%)	7.366 (0,7%)	1.019.581 (100,0%)	985.860 (99,25%)	7.435 (0,75%)	993.295 (100,0%)
36 (perdagangan,hotel,restoran)	16.064.421 (99,8%)	32.624 (0,2%)	16.097.045 (100,0%)	18.436.559 (99,8%)	27.834 (0,2%)	18.464.393 (100,0%)
37 (transpor, komunikasi)	2.662.379 (99,5%)	12.101 (0,5%)	2.674.480 (100,0%)	2.570.734 (99,6%)	11.368 (0,4%)	2.582.102 (100,0%)
38 (keuangan, jasa,sewa)	689.987 (98,3%)	11.852 (1,7%)	701.839 (100,0%)	413.591 (98,0%)	8.429 (2,0%)	422.020 (100,0%)
39 (jasa lain)	4.218.843 (99,4%)	25.943 (0,6%)	4.244.786 (100,0%)	3.995.178 (99,3%)	26.521 (0,7%)	4.021.699 (100,0%)
JUMLAH	65.108.956 (99,41%)	392.635 (0,59%)	65.501.591 (100,0%)	74.362.978 (99,48%)	383.573 (0,52%)	74.746.551 (100,0%)

Sumber: Tambunan (2002:25)

Tabel 3 menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor masih didominasi UKM. Oleh sebab itu keberadaan dan perkembangan UKM di Indonesia sangat penting mengingat jumlah penduduknya berlimpah sementara keterbatasan UB menyerap tenaga kerja. Dari Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa struktur industri di Indonesia masih didominasi oleh UKM dalam berbagai sektor. Hal ini mengindikasikan bahwa UKM memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga berada dalam berbagai sektor.

Di masa kini dan masa depan peranan UKM tentu makin penting. Beberapa argumen yang menjadikan mengapa keberadaan dan perkembangan UKM sangat penting bagi Negara Indonesia adalah: (1). Pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, (2). Ketimpangan pendapatan masyarakat juga cukup besar, demikian juga ketimpangan pembangunan antara desa – kota, (3). Bahan baku industri yang diimpor masih relatif be-

sar, UKM diharapkan mampu memproduksi barang-barang substitusi impor (4). Di masa depan UKM diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan ekspor.

Peranan UKM patut diakui untuk menyediakan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pendapatan serta motor penggerak ekspor non migas. Di atas telah dipaparkan argumen-argumen yang mendasari pentingnya pertumbuhan UKM di Indonesia. Untuk keperluan operasional penelitian, rumusan permasalahan diformulasikan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola distribusi tenaga kerja UKM secara regional (propinsi) di Indonesia dan pertumbuhannya selama periode 1999-2001?
2. Apakah pertumbuhan tenaga kerja UKM di Indonesia selama periode tersebut mengalami konsentrasi secara regional (propinsi)?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep UKM

Di Indonesia, UKM tidak memiliki satu definisi yang standar. Seperti yang dikutip dari Tambunan (2002), Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Depkop dan PKM mendefinisikan UKM berdasarkan aset (diluar tanah dan bangunan) dan nilai penjualan yang dihitung dalam rupiah. Sedangkan BPS mendefinisikan UKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut UU no. 9 tahun 1995, "Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar satu milyar rupiah atau kurang. Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari satu milyar rupiah namun kurang dari Rp. 50 milyar". Badan Pusat Statistik (BPS) membuat batasan UKM didasarkan tenaga kerja (tidak termasuk pemilik) yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, dengan jumlah tenaga kerja dibawah 100 orang.

Pentingnya Peran UKM

Teori Klasik memiliki pandangan yang berbeda dengan Teori Modern mengenai peran UKM. Menurut pandangan Teori Klasik UKM berperan dalam proses industrialisasi, penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pembangunan eko-

nomi pedesaan. Beberapa pendukung teori klasik yang telah menyumbangkan pemikiran mengenai pentingnya peran UKM antara lain Anderson, Staley and Morse, Hoselitz, Biggs and Oppenheim, serta Liedholm and Parker.

Peran klasik UKM yang paling populer dan sangat penting adalah kemampuannya menyediakan kesempatan kerja. UKM memiliki peran komplementer dengan perusahaan-perusahaan besar dalam penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi (Giaoutzi et.al, 1988, Alsters dan van Mark 1986, Amstrong et.al, 2000, Nugent, et.al. 2002, Tambunan, 2000, Sudarto, 2001).

Di samping perannya yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja, UKM juga sebagai mediasi proses industrialisasi suatu negara. Anderson (1982) membangun suatu tipologi untuk tahap-tahap industrialisasi suatu negara. Kontribusi Industri Kecil dan Rumah Tangga sangat penting dalam proses industrialisasi pada tahap awal, yaitu sebesar 50% hingga 75%. Perkembangan UKM diawali dari IKRT (*cottage industries*) bergerak dalam industri garmen, sepatu, kerajinan tangan, maupun makanan yang bahan bakunya dari sektor pertanian. Karakteristik industri pada tahap awal ini masih bersifat elementer/dasar dan berkaitan dengan produksi sektor pertanian. Kemudian pada tahap kedua telah bermunculan *workshop-workshop* yang sederhana menggantikan rumah sebagai lokasi usaha. Pada tahap kedua ini, keberadaan UKM juga telah menjadi mata pencaharian pokok bagi sebagian besar masyarakat. Demikian pula mengenai lokasi usaha, dimana pada tahap awal lokasi usaha cenderung di pedesaan. Namun pada tahap kedua ini, UKM mulai tersebar ke daerah perkotaan baik *urban* maupun *sub urban*. Perkembangan manajemen usaha dan perluasan pasar juga mulai dirintis pada tahap ini. Selain perkembangan manajemen dan

perluasan pasar, difusi inovasi dan adopsi teknologi makin meningkat. Selanjutnya perusahaan-perusahaan yang berskala kecil berkembang menuju skala ekonomi yang lebih besar dan makin meningkatkan kemampuan manajerial serta teknologi. Kemudian pada tahap ketiga, industri mulai didominasi oleh industri berskala menengah. Industri yang berskala menengah sudah memiliki sistem produksi dan manajemen yang lebih efisien. Disamping itu, industri ini telah mampu melakukan koordinasi yang lebih baik sehingga memiliki akses pasar yang lebih luas. Didukung oleh peran pemerintah, mereka juga telah mengembangkan investasi dan infrastruktur. Selama tiga periode tersebut, para pemilik usaha telah mengalami proses pembelajaran (*learning process*) baik dalam sistem produksi maupun manajemen. Proses pembelajaran tersebut tentu sangat bermanfaat bagi perkembangan menuju industri besar. Dengan demikian tahap keempat yaitu tumbuhnya industri yang berskala besar mampu menjadi *mature industry*.

Evolusi industri yang didasarkan atas skala usaha sebagaimana dijelaskan Anderson di atas memang sangat penting dalam proses industrialisasi sekaligus media difusi inovasi. Hal ini menjadikan keberadaan UKM sebagai penggerak kesempatan kerja maupun difusi inovasi pada tingkat lokal maupun regional terutama di negara sedang berkembang sangat diperlukan (Suarez-Villa, 1987).

Banyak pakar seperti Anderson (1982), Armstrong (2000), Hayter (2000) menekankan bahwa dalam proses industrialisasi sangat diperlukan sikap entrepreneurial. UKM memiliki banyak perbedaan dengan perusahaan besar. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya mengenai skala usaha dan sistem manajemen saja. Perbedaan yang paling penting adalah bahwa UKM memiliki ide kewirausahaan (*entrepreneurship*). Ide kewirausahaan inilah yang

menjadikan UKM memiliki daya tarik yang kuat dalam konteks pengembangan lokasi industri maupun pembangunan daerah (regional). Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan penemuan, evaluasi dan mengeksploitasi kesempatan untuk memperkenalkan produk baru baik barang maupun jasa, dengan cara pengorganisasian, pemasaran, dan melalui berbagai cara pengolahan bahan mentah yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, (Venkataraman, 1997; Shane and Venkataraman, 2000 dalam Shane, 2003:4). UKM sangat penting sebagai mediasi untuk memunculkan ide maupun sikap *entrepreneurship*. Di Jepang bahkan pemerintah secara tegas menciptakan kebijakan yang menjadikan UKM sebagai salah satu faktor penting untuk pembangunan industrialisasi (Aoyama, 1998 dalam Kimura 2002). Demikian pula di Malaysia, sangat konsisten dengan pengembangan UKM sebagai mediasi untuk mencapai proses industrialisasi yang tangguh (Rasiah, 2001).

Selain berperan untuk pengembangan sikap *entrepreneurship* yang sangat diperlukan dalam pembangunan proses industrialisasi, UKM juga memiliki peranan yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi. UKM memiliki peran komplementer dengan perusahaan-perusahaan besar dalam penciptaan kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi (Giaoutzi et.al, 1988, Armstrong et.al, 2000, Tambunan, 2000, Sudarto, 2001). Sementara Norcliffe and Freeman (1980), Biggs and Oppenheim (1986), Liedholm and Parker (1989), Tambunan (2000) mengatakan bahwa UKM berperan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, UKM juga memiliki peran dalam pembangunan ekonomi pedesaan (Anderson, 1982; Chuta and Liedholm, 1985). Perekonomian pedesaan (*rural*) memiliki pola yang berbeda dengan perekonomian perkotaan (*urban*). Karakteristik

perekonomian pedesaan ditandai dengan produksi barang-barang tradisional yang bahan bakunya sebagian besar berbasis hasil pertanian. Pola produksi yang demikian itu melibatkan tenaga kerja berpendidikan rendah dan upah yang rendah. Sementara perekonomian daerah perkotaan ditandai dengan produksi barang-barang modern yang melibatkan tenaga trampil yang berpendidikan tinggi.

Sedangkan Teori Modern memandang bahwa pentingnya eksistensi serta perkembangan UKM berkaitan dengan spesialisasi yang fleksibel dalam memproduksi dan ekspor. Piore and Sabel (1984) menekankan bahwa UKM sangat penting dalam proses produksi dengan kemampuannya melakukan spesialisasi. Dengan kemampuannya melakukan spesialisasi maka terjadi keterkaitan (*linkages*) antara UKM dengan usaha besar. Hal ini sangat penting bagi perkembangan UKM maupun industri besar serta perekonomian secara keseluruhan. Keterkaitan (*linkages*) adalah suatu pola hubungan antar perusahaan dengan saling memberikan keuntungan. Dalam hal ini posisi UKM sebagai penyedia *spare part* dan berbagai macam input bagi usaha yang berskala besar melalui pola sub kontrak. Pengalaman negara-negara maju seperti Eropa, AS juga negara-negara industri baru (NICs) seperti Korea, Jepang, keberadaan UKM sangat penting sebagai industri pendukung yang menyediakan input, *spare part* maupun komponen-komponen lainnya yang dibutuhkan untuk proses produksi industri berskala besar. Keterkaitan antara UKM dengan UB mendukung teori *Flexible Specialization* yang berkembang pada tahun 1980an. Teori ini menentang teori yang dikembangkan Anderson (1982) yang bernada pesimis dengan memprediksikan bahwa UKM makin menghilang ketika pembangunan ekonomi semakin maju. Namun menurut teori *Flexible Specialization* justru beranggapan bahwa UKM makin penting dalam

proses pembangunan ekonomi yang semakin maju (Tambunan, 2002). Sebagaimana dikutip dari Tambunan (2002) telah banyak studi empiris yang dilakukan Ahmed (1982), Bertin (1995), Fujita (1997), Ozawa (1985) industri-industri besar di AS melepas produksi bagaian-bagian tertentu kepada UKM sebagai subkontraktor. Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Eropa maupun NICs seperti Korea dan Jepang. Di Jepang, UKM sebagai subkontraktoring (dalam bahasa Jepang *shitauke*) bagi industri besar sebesar 43,2% pada tahun 1987 (Kimura, 2002). Bahkan Korea dan Jepang telah melakukan sebagian alih teknologinya keluar negeri (*going global*), (Etemad and Wright, 2001). Selain keunggulannya dalam spesialisasi memproduksi, Teori Modern memandang bahwa UKM sebagai salah satu penggerak motor ekspor.

UKM dan Pembangunan Regional

Pengembangan lingkungan *entrepreneurship* sangat diperlukan dalam pembangunan regional. Pengembangan lingkungan *entrepreneurship* mendorong tumbuhnya kemandirian suatu wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Dari berbagai studi empiris, UKM telah terbukti banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan regional termasuk mendukung terciptanya lingkungan *entrepreneurship*.

Salah satu kritik utama terhadap kebijakan regional tradisional/klasik pada masa lalu adalah perhatiannya yang terfokus pada masuknya investasi (*inward investment*) baik dari domestik maupun investasi dari luar negeri. Kebijakan regional tradisional pada awalnya kurang memberikan perhatian yang cukup baik terhadap faktor-faktor pembangunan yang asli (*indigenous development*). Secara khusus, perhatiannya untuk menstimulasi perusahaan-perusahaan baru, seperti Usaha Kecil Menengah dirasa sangat kurang.

Kemunculan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi regional yang dikenal dengan *Modern Regional Policy* diyakini memberikan manfaat lebih besar dan berkelanjutan. Argumen utama dalam *Modern Regional Policy* adalah modal pembangunan yang asli berasal dari dalam wilayah yang bersangkutan. Ada dua kunci yang berperan sebagai modal pembangunan yang asli yaitu Usaha Kecil Menengah (*Small Medium Enterprises*) dan perkembangan teknologi (*technological progress*).

Amstrong dan Taylor (2000) menyebutkan 5 argumen yang relevan mengenai peran UKM dalam pembangunan ekonomi regional.

1. UKM mampu menciptakan lapangan kerja.
2. UKM memiliki kemampuan memunculkan industri-industri kecil baru lainnya yang bersifat fleksibel dan bervariasi serta memunculkan *entrepreneur* baru yang berani menanggung risiko.
3. UKM memiliki kemampuan mendorong terjadinya persaingan secara intensif antar UKM bahkan usaha besar serupa. Hal ini sangat penting untuk mendorong lingkungan usaha yang kondusif dan berbudaya usaha yang kuat.
4. UKM mendorong inovasi.
5. UKM mampu meningkatkan hubungan industrial (misal hubungan industri dengan buruh) dan menyediakan lingkungan kerja yang baik dengan para buruhnya.

Giaoutzi et all (1988) menegaskan UKM sebagai faktor pembangunan regional yang bersifat *indigenous* memiliki akar dengan struktur ekonomi lokal. Menurutnya UKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi regional yang mampu mereduksi ketimpangan. Pentingnya peran UKM dalam pembangunan regional tercermin dari UKM sebagai faktor-faktor pembangunan yang asli.

Alsters dan Van Mark (1986), memandang bahwa UKM memiliki beberapa

keunggulan, sehingga UKM sangat penting dikembangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi regional. Keunggulan-keunggulan UKM tersebut adalah:

1. Diakui bahwa UKM mampu menampung tenaga kerja yang tidak tertampung di industri besar.
2. UKM memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan UKM selanjutnya. Kemudian pertumbuhan UKM baru itu menciptakan kesempatan kerja baru juga, demikian seterusnya.
3. Karena UKM sifatnya fleksibel, maka UKM mudah memunculkan inovasi
4. Manajemen UKM hanya sederhana sehingga mudah melakukan adaptasi terhadap perubahan pasar, produk, maupun lingkungan bisnis. Teknologi yang digunakan oleh UKM pun bersifat sederhana, sehingga mudah melakukan penyesuaian.

Hayter (2000) menambahkan bahwa UKM meningkatkan efek multiplier dan menciptakan keterkaitan. UKM yang membeli bahan baku serta memanfaatkan jasa-jasa dari pasar lokal secara langsung membutuhkan adanya *supplier*. Realita tersebut mendukung hipotesa *seed-bed* yang mengatakan bahwa keberadaan UKM menimbulkan kemunculan usaha-usaha terkait. Lebih lanjut, Hayter (2000) menjelaskan adanya dampak positif yang berlanjut dari keberadaan UKM dalam pembangunan daerah. Kontribusinya terhadap pembangunan lokal/daerah adalah kemampuannya menggali potensi daerah sekaligus menentukan pola pembangunan ekonominya.

Keunggulan UKM dalam pengembangan *entrepreneurship* yang menjadikan UKM makin diperlukan bagi pembangunan regional. Inilah salah satu perbedaan yang paling mencolok antara UKM dengan usaha besar adalah kemampuannya memunculkan *entrepreneurship*. Tidak seperti usaha besar, dimana hubungan antara pekerja dengan manajemen dan pemilik sangat jauh

terpisah. Demikian pula, tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan besar sangat terspesialisasi. Pekerja dalam UKM memiliki kedekatan hubungan dengan pemilik. Bahkan mereka terlibat dalam berbagai aktivitas bisnisnya, seperti membuat desain, produksi hingga pemasaran. Para tenaga kerja UKM juga dapat mengamati bahkan mempelajari pengelolaan bisnisnya. Pengalaman-pengalaman semacam itu yang sangat bermanfaat untuk memulai usaha baru.

METODOLOGI

Alat Analisis

Indeks Konsentrasi (Concentration Index, CI)

Indeks Konsentrasi merupakan salah satu alat ukur untuk menguji pola konsentrasi geografis, (LPEM, UI, 2003), dengan rumus sebagai berikut:

$$CI = \frac{(E_p/P_p)}{(E_n/P_n)}$$

Dimana:

CI = *Concentration Index*

E_p = Tenaga kerja UKM propinsi

E_n = Tenaga kerja UKM Indonesia

P_p = Jumlah penduduk propinsi

P_n = Jumlah penduduk Indonesia

Identifikasi Daerah UKM dan Sistem Informasi Geografi

Identifikasi daerah UKM dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan intensitas

daerah/propinsi didasarkan atas jumlah tenaga kerja ke dalam peringkat “sangat tinggi”, “tinggi”, “sedang” dan “rendah”. Agar memperoleh distribusi data yang mendekati normal maka tenaga kerja UKM dibobot dengan jumlah total tenaga kerja tiap propinsi. Dengan pengklasifikasian menurut intensitas tenaga kerja, maka kita dengan mudah memahami propinsi-propinsi mana saja yang memiliki konsentrasi UKM. Pengklasifikasian tiap-tiap propinsi ini didasarkan atas metode distribusi yang menggunakan rata-rata (mean) dan standar deviasi (SD), dimana simbol \emptyset = nilai indikator.

Apabila:

- $CI > 1$: propinsi yang bersangkutan memiliki peran lebih besar daripada nasional (Indonesia) dalam penyerapan tenaga kerja oleh UKM. Berarti UKM sebagai aktivitas basis dalam perekonomian daerah tersebut.
- $CI = 1$: propinsi yang bersangkutan memiliki peran sama dengan peran nasional (Indonesia) dalam penyerapan tenaga kerja oleh UKM
- $CI < 1$: propinsi yang bersangkutan memiliki peran lebih kecil daripada peran nasional (Indonesia) dalam penyerapan tenaga kerja oleh UKM

Tabel 4. Penentuan Klasifikasi Intensitas

Klasifikasi Intensitas	Nilai Indikator
Sangat Tinggi	$\emptyset \leq \text{mean} + \text{SD}$
Tinggi	$\text{mean} + \frac{1}{2} \text{SD} \leq \emptyset < \text{mean} + \text{SD}$
Sedang	$\text{mean} - \frac{1}{2} \text{SD} \leq \emptyset < \text{mean} + \frac{1}{2} \text{SD}$
Rendah	$\emptyset < \text{mean} - \frac{1}{2} \text{SD}$

Sumber: Tim Peneliti, KPPOD, (2002).

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik maupun Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta data pendukung lain dari berbagai sumber. Data utama yang digunakan adalah tenaga kerja UKM, unit usaha, jumlah penduduk, pelatihan, pinjaman dan keterkaitan vertikal UKM selama periode 1999-2001. Sumber yang digunakan untuk data utama penelitian adalah data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yaitu dari publikasi dengan judul Profil UKM di Indonesia. Alasan utama penggunaan data BPS berkaitan dengan kelengkapan data yang diterbitkan oleh BPS. Sedangkan data dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan sumber lain hanya digunakan sebagai data pendukung.

ANALISIS HASIL

Konsentrasi Regional dan Peranan UKM

Pengukuran dengan Indeks Konsentrasi dimaksudkan untuk menentukan apakah UKM merupakan aktivitas basis suatu daerah yaitu peranan daerah tersebut terhadap daerah yang lebih besar. Dengan menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai besaran dapat membandingkan peranan UKM pada suatu daerah. Tabel 5 membandingkan peranan UKM masing-masing propinsi dengan peranan UKM secara keseluruhan di Indonesia.

Kontribusi UKM dalam penyerapan tenaga kerja dari setiap propinsi tidak sama. Tabel 5 menunjukkan bahwa propinsi-propinsi yang secara konsisten memiliki peran penyerapan tenaga kerja diatas peran nasional adalah Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dari Tabel 5 terlihat propinsi-propinsi di Pulau

Jawa memberikan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja UKM.

Sedangkan di Pulau Sumatra hanya Sumatra Barat yang berperan besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Kemudian ada dua propinsi di Pulau Kalimantan yang berperan melebihi peran nasional, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Demikian pula dengan Pulau Sulawesi, dimana Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah berperan melebihi peran nasional. Kemudian Bali dan NTB juga memiliki peran yang melebihi peran nasional. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 12 propinsi (48%) di Indonesia dimana UKM memberikan kontribusi cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa kenyataannya konsentrasi UKM secara regional tidak mengalami pergeseran yang berarti selama periode penelitian. Perkembangan UKM selama periode 1998 hingga 2001 terkonsentrasi di Pulau Jawa, baik menurut unit usaha maupun tenaga kerja. Peringkat pertama, konsentrasi UKM berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang luasnya kurang dari 7% dari seluruh wilayah Indonesia justru menguasai diatas 65%. Hampir semua propinsi di Pulau Jawa mendominasi pertumbuhan UKM. Propinsi-propinsi yang mendominasi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketiga propinsi tersebut memiliki pangsa antara 17% hingga 20%. Dua propinsi lainnya yaitu DKI Jakarta dan DI Jogjakarta juga memiliki pangsa yang relatif besar, namun nilainya masih dibawah 10%.

Sedangkan Pulau Sumatra yang luas wilayahnya hampir 25% dari luas wilayah Indonesia menduduki peringkat kedua dengan pangsa sekitar 15%. Di Pulau Sumatra, distribusi UKM terkonsentrasi di propinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Nangroe Aceh Darusalam dan Jambi. Sedangkan propinsi Riau, Bengkulu dan Lampung hanya memiliki pangsa yang kecil.

Selebihnya yaitu sebesar 20% terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Di wilayah Indonesia bagian timur, distribusi UKM juga tidak merata. Pulau Sulawesi hanya terdapat UKM sekitar 6%, Pulau Kalimantan memperoleh pangsa 5%, Pulau Nusatenggara memperoleh pangsa 3,5% dan selebihnya berada di Propinsi Papua, Pulau Irian.

Dengan demikian distribusi UKM secara regional sebagaimana dapat dilihat pada

Tabel 6 menunjukkan adanya konsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu sekitar 80%. Wilayah Indonesia bagian timur hanya memiliki pangsa yang jauh lebih kecil yaitu sekitar 20%. Distribusi UKM antar propinsi dalam tiap-tiap pulau pun tidak merata. Gambaran distribusi UKM menurut unit usaha dan tenaga kerja secara detail ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 5. Indeks Konsentrasi Regional UKM di Indonesia, 1998-2001

Propinsi	1998	1999	2000	2001
Aceh	1,08	0,77	0,65	0,66
Sumut	0,76	0,69	0,69	0,82
Sumbar	1,14	1,05	1,09	1,06
Riau	0,70	0,65	0,64	0,54
Jambi	0,71	0,76	0,73	0,70
Sumsel	0,74	0,71	0,69	0,77
Bengkulu	0,71	0,62	0,63	0,62
Lampung	0,74	0,67	0,66	0,73
DKI	1,20	1,06	1,08	1,19
Jabar	1,07	1,04	1,04	1,03
Jateng	1,14	1,24	1,25	1,37
DIY	1,45	1,58	1,64	2,05
Jatim	1,14	1,17	1,17	1,29
Bali	1,39	1,43	1,42	1,31
NTB	1,04	0,96	1,29	1,16
NTT	0,62	0,69	0,78	0,71
Kalbar	0,71	1,04	0,81	0,84
Kalteng	1,14	1,11	1,00	1,27
Kalsel	1,19	1,27	1,15	1,23
Kaltim	0,87	0,96	1,00	0,97
Sulut	1,21	1,12	1,08	1,14
Sultengh	0,88	0,91	1,02	1,14
Sulsel	0,83	0,84	0,82	0,73
Sultengr	0,83	0,83	0,80	0,09
Irja	0,46	0,39	0,35	0,77

Sumber: BPS, diolah

Tabel 6. Distribusi Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM menurut Propinsi, 1998-2001

PROPINSI	1998		1999		2000		2001	
	UU	TK	UU	TK	UU	TK	UU	TK
SUMATERA	0,162	0,173	0,150	0,160	0,149	0,156	0,151	0,153
01. Nangroe Aceh Darusalam	0,021	0,022	0,016	0,016	0,015	0,013	0,015	0,013
02. Sumatera Utara	0,042	0,044	0,040	0,041	0,040	0,041	0,042	0,045
03. Sumatera Barat	0,022	0,025	0,022	0,024	0,023	0,024	0,020	0,022
04. Riau	0,012	0,015	0,012	0,014	0,012	0,013	0,011	0,011
05. Jambi	0,008	0,009	0,009	0,010	0,009	0,009	0,008	0,008
06. Sumatera Selatan	0,025	0,028	0,024	0,028	0,024	0,027	0,026	0,028
07. Bengkulu	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004
08. Lampung	0,025	0,026	0,023	0,024	0,023	0,023	0,024	0,024
JAWA & BALI	0,680	0,664	0,699	0,682	0,698	0,681	0,699	0,686
09. DKI Jakarta	0,050	0,057	0,047	0,051	0,048	0,051	0,048	0,052
10. Jawa Barat	0,206	0,196	0,209	0,194	0,198	0,193	0,197	0,195
11. Jawa Tengah	0,178	0,173	0,192	0,190	0,193	0,191	0,197	0,192
12. DI Jogjakarta	0,022	0,021	0,024	0,023	0,024	0,024	0,028	0,027
13. Jawa Timur	0,204	0,196	0,207	0,203	0,214	0,201	0,210	0,202
14. Bali	0,019	0,020	0,020	0,021	0,021	0,021	0,020	0,018
NUSA TENGGARA	0,033	0,031	0,032	0,032	0,037	0,040	0,032	0,033
15. NTB	0,020	0,020	0,020	0,019	0,023	0,025	0,020	0,021
16. NTT	0,010	0,012	0,012	0,013	0,014	0,015	0,012	0,013
KALIMANTAN	0,050	0,052	0,051	0,056	0,048	0,054	0,049	0,054
17. Kalimantan Barat	0,011	0,013	0,013	0,015	0,012	0,016	0,011	0,015
18. Kalimantan Tengah	0,009	0,010	0,009	0,010	0,008	0,009	0,009	0,010
19. Kalimantan Selatan	0,019	0,018	0,019	0,019	0,019	0,017	0,018	0,017
20. Kalimantan Timur	0,010	0,011	0,010	0,012	0,010	0,012	0,010	0,011
SULAWESI	0,065	0,065	0,064	0,066	0,065	0,065	0,058	0,059
21. Sulawesi Utara	0,016	0,017	0,015	0,016	0,015	0,015	0,015	0,014
22. Sulawesi Tengah	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,010	0,009	0,011
23. Sulawesi Selatan	0,034	0,033	0,033	0,034	0,034	0,033	0,027	0,027
24. Sulawesi Tenggara	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
MALUKU & PAPUA	0,011	0,013	0,004	0,004	0,003	0,004	0,012	0,014
25. Maluku	0,007	0,008					0,006	0,007
26. Papua	0,004	0,005	0,004	0,004	0,003	0,004	0,006	0,007
INDONESIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: BPS diolah.

Keterangan:

UU : Unit Usaha

Tk : Tenaga Kerja

Gambaran penyerapan tenaga kerja UKM selama periode pengamatan menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan sebaran unit usaha UKM. Dari Tabel 6 terlihat bahwa pangsa penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM didominasi oleh Pulau Jawa yaitu secara konsisten menguasai sekitar 60% (diluar Bali).

Berdasarkan data Tabel 6 mengenai distribusi UKM yang memperlihatkan adanya distribusi UKM yang sangat tidak merata antar pulau dan propinsi. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan keberadaan atau pentingnya UKM berbeda antar wilayah.

Pertama, konsentrasi UKM di Pulau Jawa berkaitan dengan kepadatan penduduk. Sesuai pembahasan teoritis sebelumnya, tidak mengherankan apabila ternyata sebagian besar UKM terdapat di wilayah yang padat penduduknya yaitu Pulau Jawa. Tingkat kepadatan penduduk memang sangat berperan dalam menentukan perkembangan UKM. Penduduk memberikan dua dampak bagi perkembangan UKM, yaitu penduduk menciptakan permintaan terhadap produk UKM dan sebagai tenaga kerja. Semakin tinggi kepadatan penduduk pada suatu daerah dimana sektor pertaniannya terbatas, semakin besar suplai tenaga kerja terhadap UKM (Boomgard, 1991; Tambunan, 2002).

Kedua, keberadaan UKM seringkali terkait dengan tingginya intensitas pemakaian bahan baku lokal. Konsentrasi UKM memiliki hubungan dengan intensitas pertanian di suatu daerah. UKM yang memproduksi makanan dan minuman di daerah pedesaan banyak menggunakan komoditas pertanian sebagai bahan baku utamanya. Demikian pula UKM yang memproduksi barang-barang kerajinan tangan (*handicraft*) seperti ukir, rotan, gerabah banyak menggunakan bahan baku lokal. Pemakaian bahan baku lokal inilah merupakan salah satu keunggulan UKM sehingga UKM memiliki

daya tahan yang cukup kuat dari guncangan krisis ekonomi.

Ketiga, di beberapa daerah pertumbuhan UKM dipengaruhi oleh pertumbuhan industri besar. Karena banyak UKM yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan berskala besar sebagai sub kontraktor. Fenomena semacam itu didukung oleh kondisi empiris seperti di Jepang dan Korea.

Keempat, menurut pendekatan modern pertumbuhan UKM juga didukung oleh peran pemerintah dan adanya infrastruktur, sarana komunikasi dan transportasi yang baik. Berry dan Sande (2001) menegaskan peran pemerintah sangat diperlukan untuk pengembangan UKM di Indonesia. Peran pemerintah sebagaimana dijelaskan meliputi pemberian fasilitas-fasilitas kredit, pelatihan baik teknis maupun manajerial, promosi, dan bantuan teknologi.

Identifikasi Daerah UKM

Bagian ini menyajikan analisis terhadap penyebaran tenaga kerja UKM dalam bentuk peta. Peta disusun didasarkan klasifikasi daerah ke dalam peringkat "sangat tinggi", "tinggi", "sedang" dan "rendah" menurut intensitas penyerapan tenaga kerja. Pemeringkatan masing-masing propinsi ke dalam klasifikasi "sangat tinggi", "tinggi", "sedang" dan "rendah" dapat memberikan informasi seberapa besar intensitas keberadaan UKM dari masing-masing propinsi tersebut.

Propinsi-propinsi yang memiliki intensitas UKM "sangat tinggi" adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan propinsi-propinsi dengan intensitas UKM "tinggi" adalah DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Sebagian besar propinsi berada dalam peringkat "sedang", yaitu 13 propinsi pada tahun 1998. Sementara itu, ada 7 propinsi berada dalam peringkat "rendah" pada tahun yang sama.

Hal yang menarik pada Tabel 7 adalah bahwa pada tahun 2000 ada perubahan yaitu propinsi yang berperingkat “rendah” mengalami penurunan yaitu dari 7 propinsi menjadi 4 propinsi. Sedangkan propinsi-propinsi yang berperingkat “sedang” mengalami kenaikan pada tahun 2000, yaitu dari 14 propinsi menjadi 17 propinsi.

Kemudian Tabel 7 dapat disajikan dalam bentuk peta untuk memberikan gambaran secara jelas. Potret konsentrasi UKM terlihat secara jelas di Pulau Jawa pada tahun 1998, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari peta 1 terlihat bahwa sebagian besar propinsi berada pada peringkat “sedang” yaitu 13 propinsi.

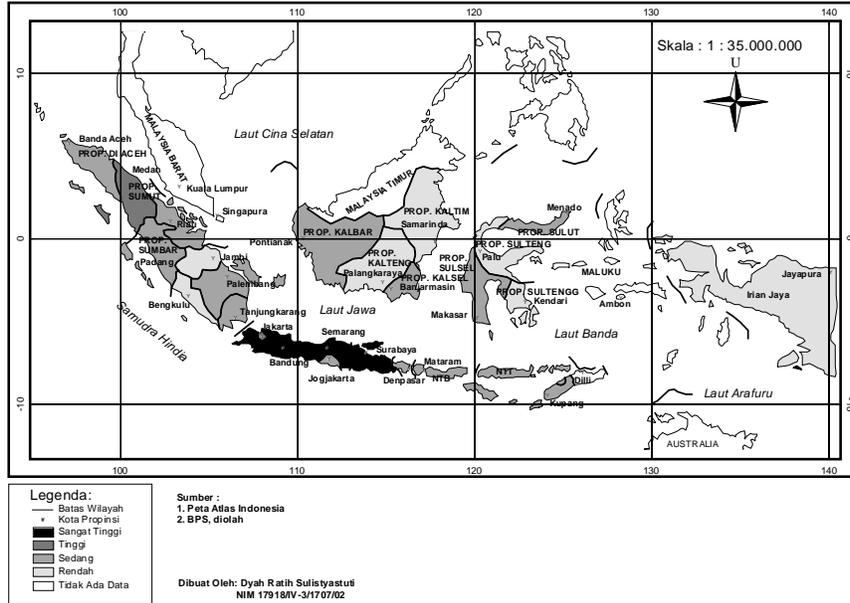
Tabel 7. Peringkat dan Klasifikasi Propinsi menurut Jumlah Tenaga Kerja UKM, 1998 dan 2001

1998			2001		
Kelas Peringkat	Propinsi	Jumlah Tenaga Kerja	Kelas Peringkat	Propinsi	Jumlah Tenaga Kerja
Sangat Tinggi	1. Jabar	5114130	Sangat Tinggi	1. Jabar	5299525
	2. Jateng	4520048		2. Jateng	5228412
	3. Jatim	5106646		3. Jatim	5492120
Tinggi	4. Sumut	1145136	Tinggi	4. Sumut	1212050
	5. DKI	1475955		5. DKI	1422523
Sedang	6. Aceh	566409	Sedang	6. Aceh	340425
	7. Sumbar	660329		7. Sumbar	593343
	8. Riau	378081		8. Riau	288883
	9. Sumsel	724776		9. Sumsel	751337
	10. Lampung	671133		10. Lampung	641617
	11. DIJ	556731		11. DIJ	744396
	12. Bali	532896		12. Bali	480309
	13. NTB	514510		13. NTB	566637
	14. NTT	304088		14. NTT	342490
	15. Kalbar	351070		15. Kalbar	411580
	16. Kalsel	465590		16. Kalteng	278056
	17. Sulut	431069		17. Kalsel	468561
	18. Sulsel	852221		18. Kaltim	304394
	Rendah	19. Bengkulu		137625	Rendah
20. Kalteng		253710	20. Sulsel	294433	
21. Kaltim		276195	21. Sultengh	730051	
22. Sultengh		232242	22. Jambi	223125	
23. Sultengg		181571	23. Bengkulu	118701	
24. Jambi		228978	24. Sultengg	188361	
25. Irja		122705	25. Irja	203629	

Sumber: BPS, diolah

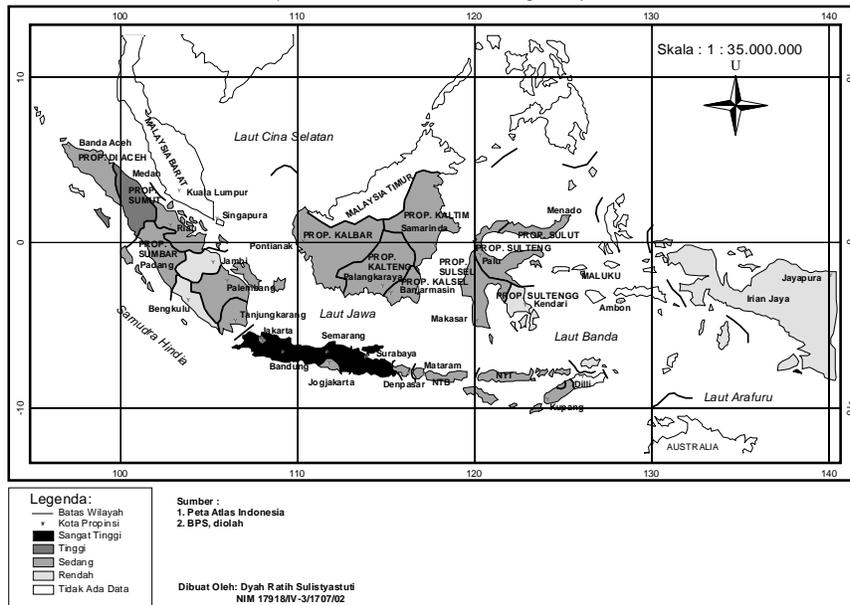
Peta 1

Peta Klasifikasi Propinsi Menurut Intensitas Tenaga Kerja UKM Tahun 1998



Peta 2

Peta Klasifikasi Propinsi Menurut Intensitas Tenaga Kerja UKM Tahun 2001



Konsentrasi UKM pada tahun 2001 tidak berbeda dengan tahun 1998. Tahun 2001, potret konsentrasi UKM juga berada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Propinsi-propinsi yang berperingkat “tinggi” tahun 2001 sama dengan 1998 yaitu Sumatra Utara dan DKI Jakarta.

Selama periode penelitian, konsentrasi UKM tidak mengalami pergeseran pada peringkat sangat tinggi dan tinggi. Hal yang menarik adanya pergeseran yaitu propinsi dengan peringkat “sedang” mengalami kenaikan pada tahun 2001. Propinsi-propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah pada tahun 1998 termasuk kelompok propinsi berperingkat “rendah”, pada tahun 2001 ketiga propinsi tersebut meningkat menjadi kelompok propinsi berperingkat “sedang”. Pergeseran *trend* ini mengindikasikan bahwa UKM di ketiga propinsi tersebut mengalami pertumbuhan pesat selama 1998-2001.

KESIMPULAN

UKM memberikan kontribusi rata-rata 90% terhadap penyerapan tenaga kerja dari semua sektor. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi UKM di Indonesia selama 1999-2001 tidak merata antar wilayah. Pertumbuhan UKM terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa terutama Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Distribusi UKM yang terdapat di Pulau Jawa sebesar 65%, Pulau Sumatra 15%, Pulau Kalimantan sebesar 6%, Pulau Sulawesi sebesar 5%, selebihnya tersebar di Nusatenggara dan Papua. Menurut perhitungan dengan indeks konsentrasi, terdapat 12 propinsi (48%) dimana sektor UKM memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja di atas peran nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Akita, Takahiro and Armida Alisjahbana (2002), “Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 38 No. 2.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Konsentrasi UKM di Pulau Jawa tentu saja tidak mendukung pembangunan ekonomi regional terutama setelah era desentralisasi. Sementara itu dari banyak studi empiris terdahulu membuktikan bahwa peran UKM sangat diperlukan. Pentingnya keberadaan serta perkembangan UKM tersebut terkait dengan beberapa manfaat dan keunggulan UKM, yaitu: memberikan kesempatan kerja, mereduksi ketimpangan pendapatan, meningkatkan ekspor non migas. Mengingat peran dan kontribusi UKM sangat besar dalam pembangunan, maka pemerintah hendaknya mendorong perkembangan UKM melalui:

1. Merumuskan kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan antara UKM dengan perusahaan besar yaitu dengan pola sub kontrak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu kontribusi pemerintah yang berbentuk permodalan, pelatihan SDM dan teknologi agar UKM mampu memproduksi input serta komponen lainnya yang diperlukan oleh perusahaan besar.
2. Meningkatkan dan mempermudah pemberian fasilitas kredit yang disertai kontrol distribusi dan pemanfaatannya. Upaya pemberian akses kredit ini perlu didukung oleh lembaga penjamin kredit yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Selain mempermudah akses kredit, perlu juga ditingkatkan jumlah/besarnya kredit yang diberikan.
3. Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun manajerial. Pelatihan tersebut terutama ditujukan agar proporsi pengusaha dan tenaga kerja UKM yang trampil dan berkualitas makin tinggi.

- Amstrong, Harvey, and Jim Taylor (2000), *Regional Economics and Policy (third edition)*, New York: Harvester Wheatsheaf.
- Anderson, Dennis (1982), Small-scale Industry in Developing Countries: A Discussion of the Issues, *World Development* 10(11) page 913-948.
- Anderson, Dennis, and Leiserson, Mark (1980), Rural Non Farm Employment in Developing Countries, *Economic Development and Cultural Change* 28(2).
- Alters, Theo, and Van Mark, Ronald (1986), *The Regional Development Potential of SMEs: A European Perspective*, Routledge.
- Ardani, A. (1992), *Analysis of Regional Growth and Disparity: the Impact Analysis of the Impres Project on Indonesian Development* (un-published dissertation), University of Pennsylvania, USA.
- Aziz, I.J. (1994), *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*, LP FE UI, Jakarta.
- Berry, Albert, Edgard Rodrigues and Henry Sandee (2002), "Firm and Group Dynamics in the Small and Medium Enterprise Sector in Indonesia", *Small Business Economics* 18: 141-161.
- Berry, Albert, Edgard Rodriguez, and Henry Sandee (2001), "Small and Medium Enterprises Dynamics", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 37, No. 3, 2001: 363-384.
- Biggs, T, and J. Oppenheim (1986), *What Drives the Sizes Distribution of Firm in Developing Countries?* EEPA Discussion Paper No. 6 HID Harvard University.
- Boomgard, P. (1991), The Non Agricultural Side of an Agricultural Economy of Java, in P. Alexander, P. Boomgard, B. White (eds), *In the Shadow of Agriculture: Non Farm Activities in the Javanese Economy, Past and Present*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.
- Chuta, E, and Liedholm (1985), *Rural Small Scale Industries and Employment in Afrika and Asia*, ILO, Geneva.
- Dluhosch, Barbara (2000), *Industrial Location and Economics Integration: Centrifugal and Centripetal Forcen in Europe*, Edward Elgar.
- Effendi, Tadjuddin Noer, (2000), *Perkembangan Usaha Kecil di Pedesaan: Kajian Perspektif Keterkaitan*, Jurnal Deperindag.
- Etemad, Hamid, and Wright, Richard, W. (2003), Internationalization of SMEs Toward a New Paradigm, *Small Business Economics*: 20:1-4.
- Giaoutzi, Maria, Peter Nijkamp and David J. Storey (1988), *Small and Medium Size Enterprises and Regional Development*, Routledge, London.
- Gani, Azmat and Peter van Dierman (2000), Some Determinants of Small Firms 'Presence' in Indonesia Manufacturing Sector, *Applied Economics Letters* 8: 471-474.

- Hart Mark, and Seamus McGuinness (2003), Small Firm Growth in the UK Regions 1994-1997: Towards an Explanatory Framework, *Regional Studies Vol. 37.2: 109-122*.
- Hariato, Farid (1996), *Study on Subcontracting in Indonesian Domestic Firm* dalam Mari Pangestu, *Small Scale Business Development and Competition Policy*, CSIS, Jakarta
- Hayter, Roger (2000), *The Dynamic of Industrial Location: The Factory, The Firm, and The Production System*, New York: John Willey and Sons.
- Hayashi, Mitsuhiro (2002), The Role of Subcontracting in SME Development in Indonesia: Micro Level Evidence from the Metalworking and Machinery Industry, *Journal of Asian Economics 13(2002) 1-26*.
- Hoover, Edgar M. (1975), *An Introduction to Regional Economics*, Alfred A. Knopf, Inc.
- Ismalia, Poppy (2003), *UKM dan Otonomi Daerah*, Forum Diskusi Ekonomi Putaran III, UPN Yogyakarta.
- Kimura, Fukunari (2002), Subcontracting and Performance of Small and Medium Firm in Japan, *Small Business Economics 18: 163-175*.
- Kuncoro, Mudrajat (2002), *Analisis Spasial dan Regional; Studi Aglomerasi dan Kluster di Indonesia*, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Liedholm, C, and Parker, J. (1989), Small Scale Manufacturing Growth in Africa: Initial Evidence, *International Development Working Paper No. 33, Michigan State University*.
- Martin, Ron and Peter Sunley (1996), *Paul Krugman's geographical economics and its implications for regional development theory: A critical assessment*, Economic Geography, Worcester.
- Norcliffe G.B and D.B Freeman (1980), Non Farm Activities in Market Center of Central Province, Kenya. *Canadian Journal of African Studies 14: 503-517*.
- Nugent, Jeffrey B and Seung-Jae Yhee (2002), "Small and Medium Enterprises in Korea: Achievements, Constraints and Policy Issues", *Small Business Economics 18: 85-119*.
- Porter, Michael E. (1998), *The New Economic of Competition*, Harvard Business Review.
- Porter, Michael E. (1998), *On Competition*, A Harvard Business Review Book.
- Purwanto, Erwan Agus (2004), *Ups and Downs in Javanese Industry: The Dynamics of Work and Life of Garment Manufacturer and Their Family*, dissertation, University of Amsterdam.
- Rasiah, Rajah (2001), *Government-Business Coordination and Small Business Performance in the Machine Tools Sector in Malaysia*, World Bank Institute.
- Rietveld, Piet (1987), "Non Farm Activities in Rural Areas: The Case of Indonesia", *Research Memorandum*, Free University, Amsterdam.
- Salim, W (1996), "Strategi Kemitraan: Tinjauan Atas Konsep dan Aplikasinya", *Usahawan No. 09 Tahun XXV September*.

- Sandee, Henry and Pieter Rietveld (1994), "Promoting Small Scale and Cottage Industries in Indonesia: An Impact Analysis for Central Java", *Bulletin of Indonesian Economics Studies* Vol. 30 No.3 December 1994.
- Sande, Henry, Roos Kities Andadari and Sri Sulandjari (2000), *Small Firm Development during Good Times and Bad: The Jepara Furniture Industry*, Institute of Southeast Asian Studies, Indonesia Assesment Series, Research School of Pasific and Asian Studies.
- Sato, Y. (2000), Linkage Formation by Small Firms: The Case of a Rural Cluster in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36 (1): 137-166.
- Schmitz, H (1982), Growth Constraints on Small Scale Manufacturing in Developing Countries: A Critical Review, *World Development* 10: 429-450.
- Shane, Scott (2003), *A General Theory of Entrepreneurship: The Individual – Opportunity Nexus*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, USA.
- Soetrisno, Noer (2003), *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Forum Diskusi Ekonomi Putaran III tahun 2003, UPN Yogyakarta.
- Sudarta, Dyah Retno Prawesti (2001), *Small and Medium Enterprice Clusters during the Economic Crisis in Indonesia* (un-published thesis), Institute of Social Science, The Hague.
- Storey David J (1981), The Role of SME in European Jon Creation: Key Issues for Policy and Research, *Small and Medium Size Enterprises and Regional Development*, Routledge, London.
- Suarez-Villa, Luis (1987), Entrepreneurship in the Space Economy, *Reveu d'Economie Regional et Urbanaire*, 28:59-76.
- Supono, Prasetyo (1991), *Pengantar Ekonomi Regional: Teori Lokasi dan Pembangunan Regional*, Pusat Antar Universitas, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supono, Prasetyo (1999), "Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro bagi Teori Pembangunan Daerah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* vol 14 No 4: 4-24.
- Tambunan, Manggara, Andi Ikwan, Lasmono Tri Sunaryanto and Ubaidillah (2002), *The Great Vertical Immobility of Small Enterprises in Indonesia* (working paper).
- Tambunan, Tulus (2000), *Development of Small Scale Industries during the New Order Government in Indonesia*, Ashgate Publishing Ltd, England.
- Tambunan, Tulus (2001), *Analisis terhadap Peranan Industri Kecil/Rumah Tangga di dalam Perekonomian Regional: Suatu Studi Perbandingan antar Kabupaten di Propinsi Jawa Barat*, <http://psi.ut.ac.id/jurnal/4tulus.htm>.
- Tambunan, Tulus (2002), *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Theil, H. (1967), *Economics and Information Theory*, American Elsevier – North Holland Publishing Company, New York – Amsterdam.

- Udijanto, Didik (2003), *UKM dalam Konteks Otonomi Daerah*, Forum Diskusi Ekonomi Putaran III, UPN Yogyakarta.
- Urata, Shujiro (2000), *Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia*, JICA, Tokyo.
- Van-Diermen, Peter and Azmat Gani (2001), “Cottage and Small Firm “Presence” in Indonesian Manufacturing between 1975-1996”, *Small Business Economics* 16, 157-166.
- Van Diermen, Peter (1997), *Small Business in Indonesia*, Ashgate Publishing, Aldershot.
- Venkataraman, S. (1997), The Distinctive Domain of Entrepreneurship Research: An Editor’s Perspective, JAI Press: 119-138.
- Weijland, Hermine (1999), “Microenterprise Clusters in Rural Indonesia: Industrial Seedbed and Policy Target”, *World Development* Vol. 27. No.9: 1515-1530.
- _____, Teknik dan Metode-metode Analisis Daerah, LPEM UI, 2003.
- _____, Profil UKM di Indonesia, BPS, 1998-2001.
- _____, Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2002-2004, Depperindag 2002.
- _____, UKM dalam angka berbagai tahun, Depperindag, 2000, 2002.